



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Tindak Lanjut Evaluasi atas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bulan Januari s.d. April 2020

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya pengaduan masyarakat dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Inspektorat telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan periode bulan April 2020.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



- Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan periode bulan April 2020 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat s.d. bulan April 2020

No	Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/Fax	Media Sosial	Total
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Tindak Lanjut.

Dari hasil evaluasi sampai dengan April 2020, tidak ditemukan adanya laporan terkait pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen pejabat dan pegawai di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi khususnya untuk terhindar dari pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun serta meningkatkan kinerja yang selama ini sudah dilaksanakan.

Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

